

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. SURYA
RAYA LESTARI II DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

ASRAD

Nomor Stambuk : 1056 40175713



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. SURYA
RAYA LESTARI II DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan Oleh:

ASRAD

Nomor Stambuk : 1056 40175713

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya
Raya Lestari II dalam Pemberdayaan Petani
Kelapa Sawit di Kecamatanbudong-
budongkabupatenmamujutengah

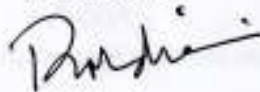
Nama Mahasiswa : Asrad

Nomor Stambuk : 105640175713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Hryadi Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryani Mustari, S.IP, M.Si

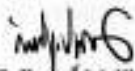
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

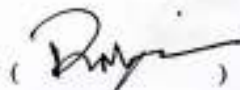
1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)



2. Dra. Hj. Nurmaeta, MM



3. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si



4. A. Luluh Prianto, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Asrad

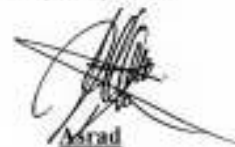
Nomor Stambuk : 105640175713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dan dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Januari 2018

Yang menyatakan,



Asrad

ABSTRAK

ASRAD 2018. *Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah* (dibimbing oleh Andi Rosdianti Razak, dan Handam,).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan tujuh orang, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam memberdayakan petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa variable (1) kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan PT. Surya Raya Lestari II dengan melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit cukup efektif dimana petani kelapa sawit yang ada memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang pengelolaan kelapa sawit yang benar. (2) memberikan bantuan kepada petani kelapa sawit berupa lahan perkebunan dan bibit kelapa sawit yang diangsur selama 10 tahun serta perbaikan sarana dan prasarana. Bantuan yang diberikan memberikan dampak yang begitu besar dalam perekonomian petani kelapa sawit (3) melakukan pemantauan kepada petani kelapa sawit yang rutin dilakukan setiap harinya. Pemantauan yang dilakukan cukup efektif dalam mengawasi dan mengontrol petani kelapa sawit

Kata Kunci: *Kerjasama Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Petani*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah ”**. Serta tak lupa kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus pada dosen pembimbing Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Handam,S.Ip, M.Si selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto. S.Ip., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.
6. Para sahabat yang selalu membantu, menyemangati dan memberikan nasehat selama ini dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Mei 2018

Asrad

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Skripsi.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta.....	8
B. Kemitraan	14
C. Pemberdayaan	21
D. Pengertian Petani.....	26
E. Konsep perkebunan Kelapa Sawit	30
F. Kerangka Berpikir.....	31
G. Diskripsi Fokus Penelitian	35
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan lokasi Penelitian.....	36
B. Tipe Dan Jenis Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Keabsahan data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
B. Kerjasama Pemerintah dan Swasta	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembangunan perekonomian industri selain dari minyak dan gas bumi yang selama ini merupakan komoditi andalan Indonesia. Produk kelapa sawit berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan industri bahan makanan maupun bahan nonpangan untuk keperluan industri. Sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat perkebunan yang mampu bertahan dan berkembang, telah disusun rencana pembangunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam melaksanakan usaha, petani mempunyai pertimbangan dalam memproduksi sehingga diperoleh pendapatan terutama dalam efisiensi produksi. Salah satu lingkup pengaturan perkebunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar memberikan nilai tambah, daya saing tinggi, dan ramah lingkungan.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam kerja samanya dengan perusahaan industri untuk pemberdayaan petani kelapa sawit yang meliputi kebun dan pabrik pengolahannya, dicerminkan oleh berkembangnya usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya sadar berkesinambungan jangka

panjang, dengan melibatkan semua potensi bangsa, membutuhkan kesungguhan, kearifan, kejujuran juga keberanian yang penuh damai. Suhendra, (2006:129).

Pemberdayaan masyarakat yang sifatnya dewasa memiliki pengertian bahwa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi sudah pula menjadi kewajiban pihak swasta atau perusahaan dimana mereka berdomisili. Beberapa dari pihak swasta yang juga ikut ambil bagian dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti beberapa perusahaan sawit yang ada di kecamatan Budong-budong kabupaten Mamuju Tengah, yaitu PT. Surya Raya Lestari II, karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia wajib menjalankan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan bagi daerah dimana perusahaan itu berada dan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 khususnya pada pasal 74 yang berbunyi, pada ayat 1, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dana atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam konteks pekerjaan sosial Industri (*industrial/occupational social work*), istilah pengembangan masyarakat seringkali digunakan sebagai salah satu pendekatan atau strategi dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), Suharto, (2006). Di dunia industri, istilah ini bahkan identik dengan makna *corporate social responsibility* itu sendiri. Pekerjaan sosial di dunia industri memiliki peran ganda .secara internal,

pekerjaan sosial berurusan dengan penanganan masalah psikososial yang dialami secara personal oleh para pegawai perusahaan. Secara eksternal, pekerjaan sosial juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan, penyediaan atau perbaikan perumahan, penyediaan pusat perawatan anak, penguatan sosial budaya bagi penduduk setempat adalah beberapa contoh penerapan metode pengembangan masyarakat atau *corporate social responsibility* yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Dalam menjalankan kelangsungan perusahaannya diperlukan sebuah tanggung jawab dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Dampak yang ditimbulkan oleh industri atau perusahaan, yaitu dampak positif dan dampak negative Dampak positif Industri berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tersedianya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif selalu timbul yang berkaitan dengan lingkungan hidup masyarakat, dan lingkungan fisik seperti polusi udara, pencemaran air, kebisingan, dan keterpencilan. Masuknya sektor industri dalam masyarakat juga akan mempengaruhi kestabilan sistem yang telah ada didalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor industrialisasi merupakan sistem baru dalam masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah sistim yang terintegrasi, yang mana terdiri dari subsistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, Tallcot Parsons, (2008:9).

Berdasarkan data angka sensus sektor pertanian Tahun 2013 kabupaten Mamuju Tengah, yaitu, Topoyo, Tobadak, dan Budong-Budong merupakan 3 (tiga) Kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian, yaitu masing-masing 5.137 rumah tangga, 5.056 rumah tangga dan 4.645 rumah tangga. Sedangkan Kecamatan Pangale merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya yaitu sebanyak 2.510 rumah tangga. Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di kabupaten Mamuju Tengah, untuk perusahaan sebanyak 5 unit dan lainnya 4 unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di kecamatan Budong-Budong, Karossa, dan Topoyo. Sedangkan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian terbanyak terdapat di kecamatan Topoyo sebanyak 2 unit dan paling sedikit di kecamatan Budong-Budong dan Tobadak masing-masing 1 unit.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki daya tarik yang tinggi khususnya dalam bidang pertanian. Salah satu pertanian kelapa sawit kecamatan budong-budong kabupaten Mamuju Tengah memiliki peranan penting untuk dapat mengolah atau memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khusus petani kelapa sawit. Pemberdayaan masyarakat ataupun petani kelapa sawit merupakan salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan menjadi kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Keberhasilan upaya pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah, tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah, perusahaan swasta dan masyarakat setempat. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya jalinan kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam pemberdayaan petani kelapa sawit. Upaya tersebut menyebabkan masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomisekaligus meningkatkan harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, Hikmat, (2004).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dirancang sistem pengembangan agroindustri kelapa sawit dengan strategi pemberdayaan yang komprehensif yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip sistem ekonomi kerakyatan yang mempunyai lima ciri, yaitu: (1) penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai dengan kepedulian terhadap yang lemah, (2) pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, (3) iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar, (4) penggerakan perekonomian perdesaan, dan (5) pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam lainnya secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak masyarakat adat dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai pembangunan pengembangan agroindustri kelapa sawit dengan tujuan pemberdayaan maka di perlukan menjalin kerjasama dengan tingkat partisipasi yang baik. Terdapat dua kata penting yang tersirat dalam proses pemberdayaan yaitu mandiri dan partisipasi. Proses pemberdayaan merujuk pada bentuk partisipasi yang paling intens yakni berupa pembagian kewenangan (*shared control*), Malvicini dan Sweetser, (2003).

Dengan kerjasama pemerintah daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat setempat, khususnya kelompok petani kelapa sawit di karenakan kerjasama ini mampu memberikan pendapatan ekonomi yang baik sehingga masyarakat dan kelompok petani kelapa sawit merasakan pemberdayaan melalui hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yakni PT. Surya Raya Lestari II. Pemberdayaan petani kelapa sawit dengan menjalin kerjasama pemerintah daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II yang dikacematan budong-budong

Kabupaten Mamuju Tengah membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ***“Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana kerjasama pemerintah daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam pemberdayaan petani kelapa sawit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II dalam pemberdayaan petani kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, di harapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan refrensi dalam pengembangan pengetahuan tentang pemberdayaan petani kelapa sawit dikecamatan Budong-budong kabupaten Mamuju Tengah.
2. Secara praktis, di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat kabupaten Mamuju Tengah di dalam Proses kerjasama yang di lakukan pemerintah daerah dengan PT. Surya Raya Lestari IIdi kecamatan Budong-budong kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta

1. Konsep Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Dalam kerjasama harus ada faktor kerjasama yang sangat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan tertentu, agar kolaborasi ketiga pihak yang terlibat terjalin komunikasi. Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan yang berada di atas kepentingan yang lain, semuanya harus berjalan sejajar sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan.

Dalam pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip-prinsip *transparansi, akuntabilitas, efektif* dan *partisipatif* sehingga *good governance* dapat terwujud dalam kerjasama yang dijalankan. *Fleksibilitas* kerjasama menyebabkan ideal bagi kerjasama awal. Pertama, kerjasama tidak mengubah independensi organisasi yang menyponsori. Kedua, kerjasama melibatkan resiko yang relatif rendah, karena kerjasama bisa terus berlangsung jika hanya selama partner mau. Ketiga, ketika organisasi bekerjasama, mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka seharusnya memahami satu sama lain lebih baik, bias memprediksi tindakan satu sama

lain, dan memperkuat kepercayaan satu sama lain. Kerjasama sebagai bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama, membagi laba atau rugi daripada bisnisnya, mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Madura, (2001:36-37).

2. Konsep Kolaborasi

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terkait secara langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005). Konsep kolaborasi didefinisikan juga untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian yang dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagai tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya menjadi esensi dari kegiatan ini.

Berdasarkan kamus besar Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha menggabungkan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gray (1989). Menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah

serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, kolaborasi merupakan langkah-langkah optimalisasi peran Pemerintah dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kolaborasi merupakan langkah untuk melibatkan semua pihak antara Pemerintah dan Swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

3. Konsep *Public Private Partnership*(*ppp*)

Dalam *public-private partnership* (*ppp*), sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian dari kata *publik* dan *private* itu sendiri. Pengertian publik secara tradisional tidak lagi diartikan semata-mata bersifat kelembagaan contohnya negara, akan tetapi lebih jauh dari itu dalam hubungan dengan seberapa besar pengaruh atau kaitan lembaga tersebut dengan kepentingan public, Hal ini berarti bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, pemerintah, instansi-instansi pemerintah ataupun organisasi harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya melalui pemberian kemudahan-kemudahan pada masyarakat tanpa membedakan satu sama lain. selain publik kita harus tahu apa makna dari *partnership*

(kerjasama). Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan dalam proses kegiatannya dilakukan melalui mekanisme tertentu yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga dapat diminimalisir biaya produksi yang dikeluarkan. Irawan, (2004:20).

Dari uraian diatas maka secara umum konsep *publik-private partnership* ini dapat diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk kontraktual antara pihak publik (federal, lembaga Negara) dengan pihak ketiga (perusahaan swasta) yang bertindak atas dasar mencari keuntungan melalui perjanjian ini. Seluruh kemampuan dan aset dari masing-masing pihak (publik dan swasta) dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah fasilitas yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum.

Publik-private partnership(ppp), merupakan pengaturan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. PPP bercirikan adanya pembagian investasi, resiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sektor swasta yang menjadi mitranya.

Alasan yang melatar belakangi lahirnya model tersebut umumnya berkaitan dengan pembiayaan, perancangan, konstruksi, operasionalisasi, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur. Dengan adanya kerjasama, maka kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah maupun sektor swasta dapat dipadukan. Peran dan pertanggungjawaban dari kerjasama bisa beragam,

bisa jadi peran pemerintah lebih banyak atau sebaliknya, peran swasta yang lebih banyak dalam suatu bentuk kerjasama. Namun, peran pemerintah yang kuat dan efektif tetap diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab dan akuntabel untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Konsep *Publik-Private Partnership* (PPP) pertama kali muncul pada Juni 1998 di British Columbia. Konsep PPP merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas dan infrastruktur. Karakteristik dari PPP (publik) adalah kerjasama yang didalamnya terdapat sharing antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab dan reward. Kerjasama tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara proyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi publik dan private sektor saja. Menurut UNDP pelaku PPP dapat dikembangkan menjadi tiga unsur yaitu:

- a. Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif,
- b. Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat,
- c. Masyarakat, memfasilitasi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik. Rahutami, (2001:3).

Pada proses untuk memperkuat kerjasama ada beberapa alasan pemerintah untuk melakukan sebuah kerjasama dengan *privat* seperti yang dikemukakan oleh Widodo Tri (2004 :2) antara lain :

1. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong perwujudann good governance and good society,
2. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumber daya pemerintah (government resources), baik dalam hal anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen,
3. Alasan ekonomis: mengurangi resiko.

Salah satu sisi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan adalah mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah. untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dukungan manajemen pemerintahan daerah yang baik, salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penduduk. Arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial salah satu diantaranya adalah mengupayakan kehidupan yang layak dan berkeadilan bagi masyarakat di daerah.

Menurut, Adisasmita Rahardjo, (2011:150) strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah:

1. Pemberdayaan, peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan social, termasuk aparaturnya untuk

melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan.

2. Kemitraan : kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbale balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
3. Partisipasi : prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 194 dan Pasal 195, telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah lain maupun Pihak Ketiga yaitu Departemen/Lembaga Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Thoby Mutis (2004) yang mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan

jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Menurut Hafshah (2000:43) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan juga merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.

Defenisi dan kebijaksanaan kemitraan usaha resmi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memerhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (PTPN VII, 2010). Menurut

Fadjar (2006: 24), faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin kemitraan atau kerjasama antara kedua belah pihak berhasil antara lain harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik para pelaku usaha kemitraan akan membantu lawan bicaranya memahami maksud dan berusaha mencapai klaim-klaim kesahihan dan arah orientasi yang jelas, profesionalisme serta saling menguntungkan (*win-win solution*).

Pelaksanaan kemitraan secara sehat dengan usaha kecil memerlukan upayakhusus, misalnya pembinaan yang tidak hanya terbatas pada pembinaan finansial dan teknis tetapi termasuk manajemen. Berkembangnya kemitraan usaha merupakan indikasi dari sudah mulai berbuahnya strategi usaha agar setiap pihak yang bersaing dapat menang dalam setiap sasarannya. Kemitraan usaha perkebunan diharapkan mampu mensinergiskan kekuatan para pelaku utama usaha kemitraan (petani dan perusahaan) serta beberapa unsur penunjang lainnya seperti pemerintah, lembaga keuangan nasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi Fadjar (2006: 46-60).

Kebijakan program kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan andalan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah yang merupakan harapan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan bagi perusahaan inti, program kemitraan merupakan peluang pembangunan usaha pada kondisi keterbatasan usaha pada kondisi keterbatasan lahan dan modal. Harris Hasyim (2005:13).

a. Pola Kemitraan

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Pembinaan kemitraan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang berlaku di suatu wilayah, oleh karena itu dukungan kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan ditunjang operasionalisasi yang baik seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerjasama kemitraan dan secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Kontrak kerjasama ini bukan hanya berupa MOU (*Memorandum of Understanding*) namun kontrak kerjasama sudah memuat perjanjian waktu, harga dan jumlah produksi, yang dibarengi dengan sanksi yang ditetapkan apabila salah satu pihak melanggar atau merugikan pihak lain. Menurut Hafsah (2000: 68-77) terdapat beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu contoh kemitraan ini adalah pola Perusahaan

Inti Rakyat (PIR), di mana perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, di samping itu perusahaan inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus mempunyai daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi.

2. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Di dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

3. Pola Dagang Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Pola Dagang Umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Lembaga penunjang dalam mendukung pembiayaan kegiatan ini sangat mendukung proses pelaksanaan sistem kemitraan pola dagang ini. Keuntungan dari pola kemitraan dagang ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati.

4. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha menengah atau usaha besar sebagai perusahaan mitra usaha bertanggung jawab terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra diberi kewajiban untuk memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target target yang harus dipenuhi, sesuai dengan

ketentuan yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi atau *fee* yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan usaha menengah.

5. Waralaba

Pola waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Kelebihan dari pola waralaba ini antara lain adalah bahwa perusahaan perwaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Mulyasa, (2008) Hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara Pemberdayaan adalah kata yang sangat menarik bagi beberapa orang, ada sementara orang yang karena beragam alasan tidak suka kata ini, orang tertarik kepadanya karena ia tampak menawarkan sesuatu yang pada saat sekaran tidak ada tetapi mampu mengubah kehidupannya. Kata ini mengandung ide bahwa orang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan mereka serta mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih baik.

Pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam Sulistiyani, (2004:71) menjadi sebuah credo baru dalam pemberdayaan, dan bahkan ke segenap sektor kehidupan masyarakat yang mana berlaku untuk kehidupan. Diadopsinya pengertian pendekatan pemberdayaan oleh pemerintah menurut Sumodiningrat karena dua alasan:

1. Pemerintah sangat merosot pendapatannya sehingga tidak lagi bisamelakoni sebagai lokomotif pembangunan itu sendiri, pemerintah sepenuhnya tidak bisa di harap untuk membiayai pembangunan. Yang bisa di lakukan adalah menstimulasi masyarakat agar bisa membiayai pembangunan itu sendiri. Penyebabnya mudah di tebak: kemerosotan pendapatan, baik dari minyak, pajak, BUMN bahkan pinjaman dari luar negeri.
2. Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya berpola dari pemikiran pemerintah atas pembangunan itu sendiri. Alhasil

pembangunan bermakna pemaksaan kehendak pemerintah kepada masyarakat. Akibatnya pembangunan menjadi bias dari tujuan awalnya. Bahkan disaat lalu muncul ledakan dimana ada pembangunan disitu ada penggusuran. Hari ini masyarakat alergi pada pola tersebut, pemerintah dan rakyat sepakat agar pembangunan diadakan diatas kesepakatan mereka berdua (sebagai institusi), dan ini berarti memberdayakan masyarakat. Dalam bahasa teknis disebut juga pembangunan yang berakar pada kehendak rakyat.

Suhendra (2006:129) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “upaya sadar berkesinambungan jangka panjang, dengan melibatkan semua potensi bangsa, membutuhkan kesungguhan, kearifan, kejujuran juga keberanian yang penuh damai”.

Pemberdayaan menekankan kemajuan dan otonomi dari individu. Pemberdayaan berhubungan dengan peningkatan kemampuan individu untuk bertindak bagi kepentingan organisasi. Ia berusaha menciptakan suatu hubungan yang lebih jelas antara motivasi dan efektifitas organisasi. Sedangkan secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan yang berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan seringkali dikatakan di kaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Terlepas dari keinginan dan minat mereka dengan pemahaman kekuasaan seperti ini pemberdayaan merupakan sebuah proses perubahan kemudian memiliki

konsep yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya pemberdayaan sangat tergantung terhadap dua hal :

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah jika kekuasaan dapat di rubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan yang tidak statis, konsep ini menekan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut sumaryadi (2005:111) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai batas ambang batas tercapainya keseimbangan antara organisasi sebagai pemerintah dengan masyarakat sebagai yang diperintah. Pengertian Menurut Ndaraha, (2000:80) diperlukan program pemberdayaan :

- a. Pemberdayaan Politik

Bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap yang memerintah sehingga yang diperintah mendapatkan apayang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

- b. Pemberdayaan Ekonomi

Dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang di perintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan.

c. Pemberdayaan Sosial Budaya

Bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi manusia (*human investment*) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan manusia seadil adilnya.

d. Pemberdayaan lingkungan

Dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang di perintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

e. Pemberdayaan Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan Infrastruktur adalah program strategis dalam rangka peningkatan cakupan dan kualitas layanan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa sehingga dapat dijadikan input dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan

Menurut Miftha Thoha (2003:12) adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Membantu pengembangan kemanusiawi yang otentik dengan integral darimasyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

4. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Robin (Miftah Thoha 2003:107) menyebutkan ada lima prinsip dasar dari pemberdayaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ekstensinya pemberdayaan masyarakat memerlukan break evens dalam setiap kegiatan yang dikelola. Namun berbeda dari organisasi bisnis, kendati pemungutan fee telah menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi keuntungan yang diperoleh dapat didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- b. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
- c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- d. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya dalam hal dana, baik berasal dari pemerintah, swasta maupun dari sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan sosial lainnya.
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

D. Pengertian Petani

Menurut Saragih (2001) dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*). Industrialisasi menjamin iklim makro kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. A.T. Mosher juga membagi pertanian dalam dua golongan, yaitu pertanian primitif dan pertanian modern. Pertanian primitif diartikan sebagai petani yang bekerja mengikuti metode-metode yang berasal dari orang-orang tua dan tidak menerima pemberitahuan (inovasi). Mereka yang mengharapkan bantuan dan untuk mengelola pertaniannya. Sedangkan pertanian modern diartikan sebagai yang menguasai pertumbuhan tanaman dan aktif mencari metode-metode baru serta dapat menerima pembaruan (inovasi) dalam bidang pertanian. Petani macam inilah yang dapat berkembang dalam rangka menunjang ekonomi baik di bidang pertanian maupun di bidang-bidang lainnya.

Petani berada pada usia produktif (rata-rata 41 tahun) dan belum didukung oleh tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal yang memadai. Rata-rata pendidikan formal 9 tahun (setingkat tamat SLTP) dan rata-rata mengikuti pendidikan non formal 7 hari. Dilihat dari modus, petani dominan (yaitu 48,2 persen) belum pernah mengikuti pendidikan non formal (kursus atau pelatihan). Pengalaman petani beragribisnis yaitu rata-rata 13,69 tahun diharapkan menunjang keberhasilan agribisnis petani, namun belum didukung oleh luas penguasaan lahan pertanian yang memadai, rata-rata hanya 1,61 hektar (karena 66,67 persen petani memiliki kebun sawit dan karet).

Pengertian petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi. Serta untuk mengelola lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki

lahan 0,25 ha, tapi pemanfaatan teknologinya yang baik dapat juga dikatakan petani modern, Yaitu petani-etani dahulu yang bergantung pada sumberdaya dan kehidupan mereka berpindah-pindah menurut Wahyudin (2001:34)

Mengingat Negara Indonesia yaitu Negara yang mayoritas penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk pertanian diantaranya:

1. Sawah, yaitu suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut
2. Tegalan, adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung padapengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena pemukiman yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.
3. Pekarangan, yaitu lahan yang beradadilingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.
4. Ladang berpindah, ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak di mana setelah beberapa kali panen atau ditanami, maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke lahan lain yang baru atau lahan yang sudah lama tidak digarap.

5. Tanaman keras, suatu jenis varietas pertanian yang jenis pertaniannya adalah tanaman-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, dan coklat.

Menurut Mosher (2003:28), setiap petani memiliki tiga perana yaitu;

1. Petani sebagai juru tani (*cultivator*).

yaitu seseorang yang mempunyai perana memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah.

2. Petani sebagai pengelola (*manager*)

Yakni segala kegiatan yang mencakup pikiran yang didorong oleh kemauan terutama pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari alternative yang ada.

3. Petani sebagai manusia

Selain sebagai juru tani dan pengelola. Petani adalah seorang manusia biasa. Petani adalah manusia yang menjadi anggota dalam kelompok masyarakat, jadi kehidupan petani tidak terlepas dari masyarakat sekitarnya.

Apabila kita lihat pengertian petani menurut Mosher tersebut maka titik tekanya adalah usaha taninya dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menunjukkat bahwa sebagai petani, ia yuga sebagai anggota yang tidak terlepas dari lingkungan sosialnya.

E. Konsep Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan pengembangan subsektor perkebunan yang berbasis agribisnis. Aktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya memberikan nilai tambah yang tinggi di sektor perekonomian. Sektor agribisnis

merupakan lapangan kerja yang berperan besar dalam penurunan tingkat pengangguran. Gumbira dan Febriyanti, (2005).

Perkebunan kelapa sawit saat ini merupakan perkebunan yang dikelola oleh swasta dan masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola sendiri. Komoditi kelapa sawit ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah daerah. Di dalam UU No 18 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Indonesia telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitian Almasdi Syahza (2007) menjelaskan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota; menciptakan *multiplier effect* ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit.

Almasdi Syahza (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, kegiatan penelitian untuk mengkaji dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Informasi diperoleh melalui pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Hasil diperoleh kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 3,03, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Indeks kesejahteraan petani di pedesaan tahun 2003 sebesar 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pada periode tahun 2003-2006 indeks kesejahteraan petani 0,18 dan periode tahun 2006-2009 juga mengalami positif sebesar 0,12. Ini berarti kesejahteraan petani pada periode tersebut meningkat sebesar 12 persen.

F. Kerangka Berfikir

Produk kelapa sawit berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan industri bahan makanan maupun bahan nonpangan untuk keperluan industri. Sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat perkebunan yang mampu bertahan dan berkembang, telah disusun rencana pembangunan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Dalam

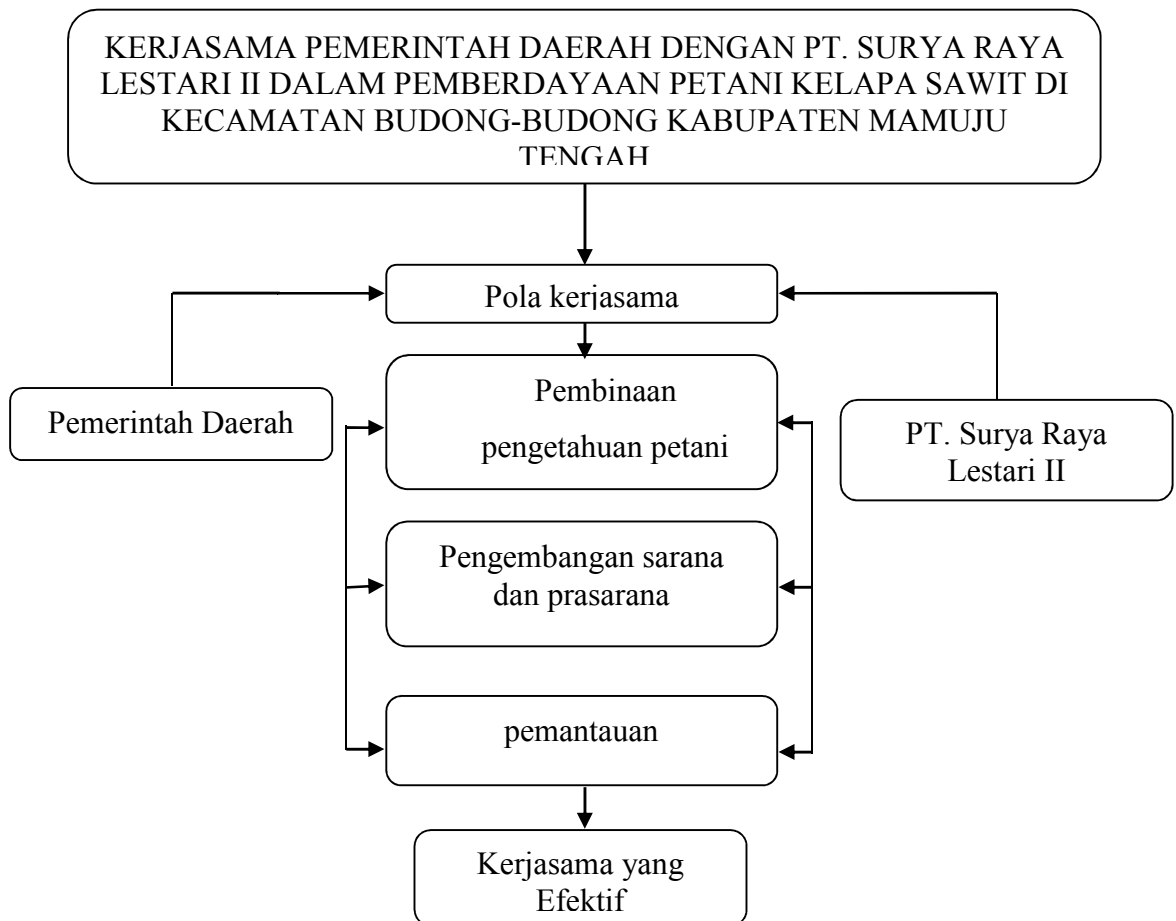
kerjasama harus ada faktor kerjasama yang sangat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan tertentu, agar kolaborasi ketiga pihak yang terlibat terjalin komunikasi.

Perkebunan kelapa sawit saat ini merupakan perkebunan yang dikelola oleh swasta dan masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelolanya sendiri. Maka di perlukan sebuah kerja samayang baik untuk mengelolah perkebunan kelapa sawit khususnya di kabupaten Mamuju Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan sebuah kerjasama dengan salah satu perusahaan swasta yang terletak di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah yakni PT. Surya Raya Lestari II, salah satu tujuan agar dapat mengembangkan sector pertanian yang berada di Kecamatan Budong-Budong agar kiranya kelompok masyarakat petani kelapa sawit dapat merasakan kesejahteraan sosial. Dalam kerja sama ini diperlukan sebuah kolaborasi yang baik agar kiranya dapat merasakan keuntungan bersama terkhusus masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan PT. Surya Raya Lestari II.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat setempat, khususnya kelompok petani kelapa sawit di karenakan kerjasama ini mampu memberikan pendapatan ekonomi yang baik sehingga masyarakat dan kelompok petani kelapa sawit merasakan pemberdayaan melalui hubungan kerjasama antara Pemerintah

Daerah dengan pihak swasta yakni PT. Surya Raya Lestari II. Pemberdayaan petani kelapa sawit dengan menjalin kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari Iiyang terletak di Kecamatan Budong-Budong kabupaten Mamuju Tengah membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak baik dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Adapun pemaparan secara ringkas atas kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Bagan 1: Kerangka pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan di atas, dapat dijelaskan bahwa Peran Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II yang dalam pembinaan, pelayanan, serta pengembangan terhadap Masyarakat petani kelapa sawit akan dapat terlaksanakan dengan baik manakala Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya Lestari II melekukan pola kerjasama yang baik dalam memberdayakan petani kelapa sawit, Untuk menciptakan Pemerintahan yang Kredibel dan bermartabat. Secara garis besar ketiga variable diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pembinaan terhadap Masyarakat Petani kelapa sawit adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja Masyarakat yang dianggap belum maksimal, oleh karena itu Perusahaan PT Surya Raya Lestari II memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya petani kelapa sawit untuk memberikan pemahaman dalam mengelola dan membudidayakan kelapa sawit yang baik dan benar.
2. Pengembangan sarana dan prasarana terhadap petani kelapa sawit adalah upaya memaksimalkan seluruh potensi daerah agar dapat berdaya secara efektif dan efisien. Perusahaan PT Surya Raya Lestari II menyediakan sarana dan prasarana berupa lahan perkebunan kelapa sawit serta prasarana berupa bibit kelapa sawit, alat perkakas, dan alat transportasi. Pelayanan yang dilakukan PT Surya Raya Lestari II terhadap masyarakat petani kelapa sawit adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan bantuan sebagai usaha melayani kebutuhan khususnya petani kelapa sawit.
3. Pemantauan untuk melihat kembali pekerjaan sudah terlaksana atau belum terlaksana hal ini berhubungan dengan tujuan telah ditetapkan dalam program yang direncanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penulisan penelitian ini yaitu dua(2) bulan. dan Lokasi penelitian ini akan di pusatkan pada Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Topoyo yaitu di PT. Surya Raya Lestari I yang terletak di Kecamatan Budong-Budong. Selanjutnya, lokasi penelitian ini di lanjutkan kepada petani kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis data penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

C. Sumberdata

- a. Data primer, adalah data yang di peroleh melalui pengamatan dan wawancara secara langsung pada PT. Surya Raya Lestari II, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, berupa informasi mengenai pemberdayaan petani kelapa sawit.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan di selidiki, kegunaanya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan. Dalam penelitian ini, penulis mengati setiap kegiatan yang dilakukan oleh petani kelapa sawit secara langsung, seperti mengamati program tanam serta melakukan pemilihan terhadap beberapa catatan atau dokumen serta informasi-informasi dari pengurus dan pihak-pihak yang berkompeten dalam keberadaan kelompok petani kelapa sawit.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan. dan mengadakan tanya jawab kepada pimpinan PT. Surya Raya Lestari II atau karyawan yang bekerja di PT. Surya Raya Lestari II serta masyarakat yang berkompeten dan petani kelapa sawit.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal tentang perkembangan atau variabel yang berupa catatan-catatan, map, CD, file, foto, arsip dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui atau berkompeten dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel Informan :

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Ir. Achmad Rezki.K M. Si	AR	Kepala Bidang Perkebunan Mamuju Tengah	1
2.	Holong Manullang	HM	kepala personalia kepegawaian PT Surya Raya lestari II	1
3	Rudi,Amir,Rijal,Umar, Kahar	RD,AM,RJ, UM,KH	Masyarakat	5
Total informan				7

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen dan hasil observasi dalam penelitian ini dihimpun dan dideskripsikan. Tahap-tahap analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi data ini akan berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian dan dalam kegiatan ini data yang tidak berguna atau tidak diperlukan untuk kepentingan kegiatan analisis akan dibuang. Peneliti dalam kegiatan analisisnya akan selalu melakukan reduksi data dari sebelum pengumpulan data di lapangan sampai proses verifikasi selesai dan tidak membutuhkan data baru lagi. Reduksi juga bisa dinyatakan sebagai bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, mengurangi hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat dilaksanakan.

2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, gambaran dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami.

Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan serta tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu

dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat lebih dimengerti dalam bentuknya yang lebih kompak.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan komponen analisis yang memberikan penjelasan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Simpulan yang diperoleh dari penyajian data bersifat sementara sebab masih terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru. Hal ini penting untuk mendapatkan simpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara keilmuannya.

E. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu dan data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang di kumpulkan di anggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh kerena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih di perlukan.

2. Pencermatan pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah di peroleh sebelumnya.
- b. Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk di uji keakuratannya.
- c. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu yang berkenaan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang di peroleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu [Kabupaten](#) di Provinsi [SulawesiBarat](#), [Indonesia](#). Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari [KabupatenMamuju](#) yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten Mamuju Tengah dibagi menjadi 5 kecamatan, antara lain: [Pangale](#), [Budong-Budong](#), [Tobadak](#), [Topoyo](#), dan [Karossa](#).

Kronologi pembentukan kabupaten Mamuju Tengah yang masi tergolong baru merupakan kerja keras dari para masyarakat serta akademisi. Ketua DPRD Mateng Arsal Aras mengungkapkan bahwa ketika itu yang tergagas adalah membentuk Kabupaten Bupas atau Budong-Budong Pasangkayu. Sebagai gabungan dua wilayah yang berada di ujung Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju. Namun pada perkembangannya ternyata kabupaten Mamuju Utara (Matra) lebih dulu terbentuk, sebab lebih memenuhi syarat untuk lahirnya Povinsi Sulbar yang diundang pada tahun 2004 Semangat membentuk mamuju tengah (Mateng) tetap menyala dengan beberapa nahkoda penting yakni segenap tokoh pemuda dan masyarakat sepakat, pembentukan kabupaten mamuju tengah harus dilanjutkan, maka para tokoh pemuda melaksanakan deklarasi pembentukan mateng dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Mamuju Tengah.

Dalam perjalanannya dilakukan proses perumusan terhadap UU No. 32/1999 tentang pemerintahan daerah dan PP 78/2007 tentang pembentukan dan penggabungan dan pemekaran daerah sehingga menjadi landasan tokoh pemuda, masyarakat dan akademisi Mateng bergerak cepat membentuk komite aksi percepatan pembentukan (KAPP) Kabupaten Mateng. Saat itu KAPP menggelar rapat bersama tokoh terkait proses pembentukan Mateng termasuk tokoh utama Aras Tammauni bersepakat untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Mamuju yang diterima langsung oleh ketua DPRD Mamuju Thamrin Andi Endeng selanjutnya kebupti Mamuju Suhardi duka

Setelah proses panjang melalui surat presiden Mateng masuk dalam daftar yang disetujui untuk dibahas antara pemerintah, DPD dan DPR RI. Dalam pembahsan itu disepakati untuk membentuk panja pemekaran yang didalamnya gabungan ketiga institusi itu. Panjalah yang meninjau daerah-daerah yang akan dimekarkan termasuk Mateng. Kajian panjang menyebutkan bahwa Mateng layak dimekarkan langkah berikutnya adalah tim Ibukota turun kelapangan dan menyepakati Kecamatan Tobadak sebagai Ibukota Mateng tepatnya di Desa Benteng Kayu Mangiwang. Pada hari kamis 13 Desember 2012 sidang komisi II DPR RI. Digelar pada malam hari semua fraksi menyetujui Kabupaten mateng untuk ditetapkan dalam siding paripurna DPR RI. Pada hari jumat 14 Desember 2012. Tanggal inilah yang kemudian menjadi patokan peringatan lahirnya kabupaten yang Memiliki Motto Lalla' Tassisara.

2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Menyajikan tentang gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai 194 pegawai serta dalam hal keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan lingkungan, perilaku masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah membuat informasi tentang dasar pembangunan pertanian, visi dan misi, motto program pokok Dinas Pertanian dalam kebijakan dan strategi

1. Tugas Dinas Pertanian

Penyuluh pertanian bertugas sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada Instansi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Serta dapat menjadi abdi masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan produktivitas pertanian.

2. Fungsi Dinas Pertanian

Selain menjadi abdi masyarakat dan abdi Negara penyuluh pertanian juga mempunyai tugas yang sangat penting yaitu :

- a) Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhannya dibidang pertanian khususnya ilmu pengetahuan.
- b) Dinas Pertanian merupakan jembatan antara praktik atau kegiatan yang dijalankan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dan senantiasa dibutuhkan oleh petani.

- c) Penyampai, penguasaan dan penyesuaian program Nasional dan Regional agar dapat dilaksanakan oleh petani dalam rangka mensukseskan program [pembangunan Nasional](#).
- d) Kegiatan [pendidikan non formal](#) yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah pertanian yang berkembang.

3. Peran Dinas Pertanian

Dalam konteks otonomi daerah saat ini, Dinas Pertanian mempunyai peran yang sangat vital sebagai pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kedepannya Dinas Pertanian dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi terkait upaya peningkatan produktivitas pertanian secara komprehensif dan terpadu. Menyediakan media untuk berkreasi dan membuat terobosan baru. Membangun pola komunikasi efektif dan suasana kerja yang inovatif.

4. Visi Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

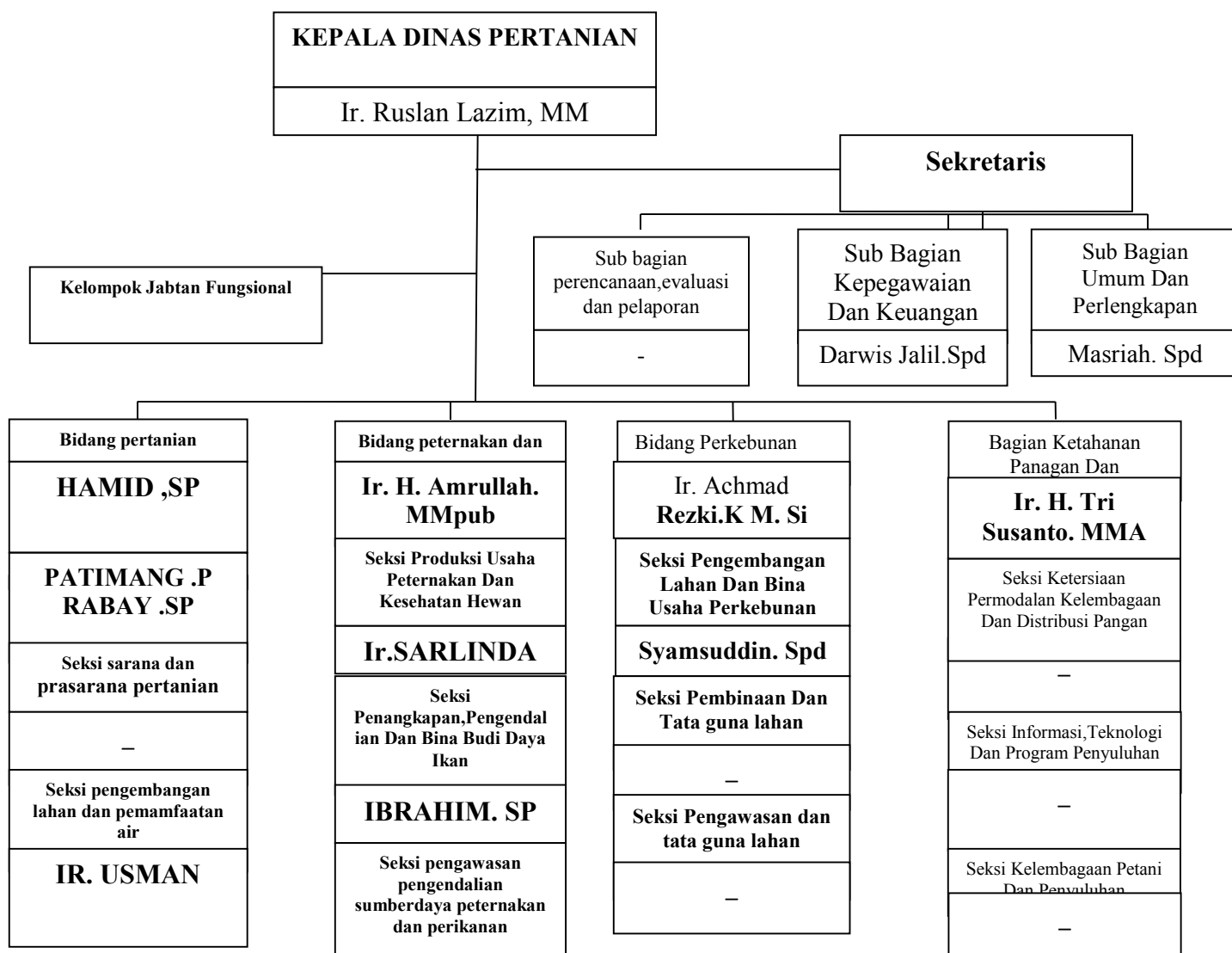
Visi: Menjadikan Dinas Pertanian sebagai tempat pelayanan bagi seluruh masyarakat khususnya petani di kabupaten mamuju tengah

Misi:

- a) Menjadikan Dinas Pertanian sebagai tempat masyarakat mengadakan semua permasalahan pertanian.
- b) Meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, kedisiplinan dan kinerja petugas.

- c) Meningkatkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, kondusif, dan kebersamaan dan penuh kekeluargaan.

5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Dokumen Dinas Pertanian Mamuju Tengah tahun 2017

3. Keadaan Geografi

Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah berkedudukan di Kecamatan Topoyo Secara Geografis Kecamatan Topoyo terletak pada garis bujur $119^{\circ}17'07''$ dan pada garis lintang $2^{\circ}04'05''$. ketinggian lokasi berkisar 0
Sebelah— 500 DPL dengan

batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
3. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
4. Kependudukan Wilayah Kecamatan Topoyo semula adalah merupakan Daerah Penempatan Transmigrasi sehingga masyarakatnya merupakan masyarakat yang bersifat Heterogen, terdiri dari berbagai suku dan Agama serta Daerah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bugis, Mandar, Bugis Makassar, Toraja dan Mamasa.

4. Keadaan Demografi

Table 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Mamuju Tengah, 2015

NO	Kelompokk Umur	Laki –laki	perempuan	Jumlah
1	0–4	6 877	6 814	13 691
2	5–9	6 904	6 298	13 202
3	10–14	6 303	5 991	12 294
4	15–19	5 809	5 295	11 104
5	20–24	4 295	4 602	8 897
6	25–29	4 696	4 799	9 495
7	30–34	5 199	5 300	10 499
8	35–39	5 007	4 897	9 904
9	40–44	5 303	4 494	9 797
10	45–49	3 908	3 297	7 205
11	50–54	2 705	2 494	5 199
12	55–59	2 001	1 697	3 698
13	60–64	1 606	1 100	2 706
14	65–69	1 000	699	1 699
15	70–74	593	501	1 094
16	75+	503	397	900
Total		62 709	58 675	

Sumber/Dinas Pertanian: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/

Pertanian suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya bercocok tanam, sebagian besar mata pencaharian masyarakat di kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar petani, sehingga sector pertanian sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, Sektor pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah sangatlah berkembang di tandai dengan adanya kelompok petani di setiap Kecamatan dan Desa, khususnya di Kecamatan Budong-Budong yang memiliki jumlah Desa 11

dan masing-masing Desa memiliki kelompok tani terlihat dari segi umur masyarakat petani umur 15 tahun sampai dengan umur 55 tahun sehingga pengembang sector pertanian cukup memadai dalam pemberdayaan kelompok pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Budong-Budong.

Tabel 2.Jumlah Kecamatan, Desa Dan Dusun di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	. Karossa	13	55
2	Topoyo	15	66
3	Tobadak	8	55
4	Budong Budong	11	70
5	Pangale	9	45
	Jumlah	56	291

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik (Bps) Kabupaten Mamuju

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan kerjasama antara masyarakat kelompok tani yang berada di Kecamatan Budong-Budong yang memiliki jumlah Desa 11 serta memiliki jumlah Dusun 70 yang memiliki kelompok tani di masing-masing 11 Desa yang berada di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. dilihat dari sector pertanian menunjukkan bahwa pengembangan pemberdayaan petani kelapa sawit. Pemerintah dan masyarakat melakukan kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok tani yang berada di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

5. Profil PT. Surya Raya Lestari II

PT. Surya Raya Lestari II yang sebelumnya merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian

mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984, dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, Perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2017, luas areal yang dikelola Perseroan mencapai 290.961 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, Perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti-plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat (Income Generating Activity/IGA) baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2017, Perseroan telah bekerja sama dengan 73.099 petani kelapa sawit yang bergabung dalam 2.736 kelompok tani.

Kerjasama tersebut memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola Perseroan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

Seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan, pada tahun 1997 Perseroan melakukan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering/ IPO) di Bursa Efek Indonesia (saat itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). Saat ini kepemilikan saham publik Perseroan mencapai 20,32% dari total 1,925 miliar saham yang beredar. Kepercayaan investor yang tinggi terhadap Perseroan dicerminkan dengan posisi harga saham yang kuat. Pada perdagangan yang berakhir tanggal 29 Desember 2017, harga saham Perseroan dengan kode perdagangan "AALI" ditutup pada posisi Rp 13.150,-.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, selain mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, Perseroan juga mengembangkan industri hilir. Perseroan telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit (refinery) di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Dumai, Provinsi Riau. Produk minyak sawit olahan dalam bentuk *Olein, Stearin, dan PFAD* ini untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok dan Filipina. Perseroan juga telah mengoperasikan pabrik pencampuran pupuk NPK di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2016 dan di Bumiharjo, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017. Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan usaha integrasi sawit-sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menghadapi tantangan di masa mendatang, Perseroan memfokuskan strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua lini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang terkait dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit

Diantaranya kata dia, adalah perusahaan perkebunan sawit PT. Surya Raya Lestari II yang beroperasi di Kecamatan Topoyo dan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah luas HGU yang dimiliki 5.256 Ha, setelah itu mengembangkan satu anak perusahaan lainnya yaitu PT. Badra Sukses yang dibangun sejak tahun 2000-an dan kini memiliki luas HGU sekitar 1.033

PT. Surya Raya lestari II melakukan ekspansi perkebunan sawitnya dari Kabupaten Mamuju Utara (Matra) ke Mamuju Tengah (Mateng) Provinsi Sulawesi Barat.

PT. Surya Raya Lestari II mengembangkan sawit dengan mengubah perkebunan karet yang sudah dianggap tidak produktif miliknya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dengan kehadiran perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju Tengah membawa kesejahteraan bagi masyarakat petani kelapa sawit. Selain itu memberikan kontribusi bagi peningkatan bagi pendapatan Daerah serta memberikan adil bagi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, agama dan olahraga bagi masyarakat.

PT. Surya Raya Lestari II membangun pabrik penyulingan inti sawit dan pencampuran pupuk (fertilizer blending plant). Total investasi yang disiapkan sebesar Rp 300 miliar seluruh Indonesia.

PT. Surya Raya Lestari II membangun pabrik pencampuran pupuk berkapasitas 100.000 ton per tahun yang dibangun di Mamuju Tengah. Pembangunan pabrik ini memerlukan dana sebesar Rp 100 miliar. Selain itu, perusahaan juga menyelesaikan pembangunan penyulingan minyak inti sawit senilai Rp 200 miliar dengan kapasitas produksi 400 ton per tahun, sehingga perusahaan tersebut menghasilkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan kapasitas mencapai 1.200 ton per tiga tahun.

PT. Surya Raya Lestari II mencatatkan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2015, 2016 dan 2017. Harga rata-rata CPO (minyak sawit mentah) dunia naik dari USD 622 per ton pada tahun 2017 menjadi USD 700 per ton. Kenaikan harga CPO ini lebih dipengaruhi oleh berkurangnya suplai tandan buah segar (TBS) sebagai dampak musim kemarau panjang pada tahun 2017.

B. Kerja Sama Pemerintah dengan PT Surya Raya lestari II Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit

1. Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok petani dalam usaha meningkatkan kinerja. Pembinaan terkait keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang sangat membantu petani dalam keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan sektor pertanian yang ada. Berikut hasil wawancara bersama Kabid Perkebunan Mamuju Tengah terkait kerja sama yang dilakukan dalam pembinaan yang dilakukan kepada petani kelapa sawit. Beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi pembinaan yang kami lakukan bersama dengan PT Surya Raya lestari II yaitu kami melakukan pelatihan kepada masyarakat khususnya petani kelapa sawit untuk memberikan pemahaman dalam mengelola dan membudidayakan kelapa sawit yang baik dan benar. Pelatihan ini sangat memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit mengapa saya katakan sangat bermanfaat karena Pelatihan yang kami lakukan ini bertujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dalam melakukan pengelolaan dan pembudidayaan kelapa sawit. Sehingga ketika petani terjun langsung ke lapangan itu akan lebih memudahkan dalam melakukan penanaman dan perawatan yang baik dalam mengelola kelapa sawit. (Wawancara AR, 20 November 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PT Surya Raya lestari II sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya petani kelapa sawit. Pembinaan dengan cara melakukan pelatihan kepada petani itu akan memberikan dampak yang sangat bagus dalam melakukan pengelolaan atau pembudidayaan kelapa

sawit, kerana dengan adanya pelatihan yang dilakukan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petani dalam hal tata cara melakukan penanaman dan perawatan kelapa sawit yang baik dan benar. pelatihan sangat penting dilakukan karna terbukti memberikan manfaat bagi petani yang ada di Mamuju Tengah yang terbilang sukses.

Penulis juga melakukan wawancara bersama Kepala Personalia Kepegawaian PT Surya Raya lestari II mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait kerjasama yang dilakukan dalam hal pembinaan kepada petani kelapa sawit, beliau mengatakan bahwa

“Iya dari PT Surya Raya lestari II dan pemerintah bekerja sama dalam melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit, kami melakukan pembinaan ini agar petani yang ada disini mempunyai pengetahuan dalam hal pengelolaan kelapa sawit, apa lagi di kabupaten mamuju tengah ini mayoritas petani kelapa sawit dan para petani kelapa sawit yang ada di kabupaten ini kurang mempunyai pengetahuan dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit. Hal ini mendorong kami untuk memberikan pembinaan kepada petani kelapa sawit. (Wawancara, HM 27 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pelatihan yang di lakukan oleh PT Surya Raya Lestari dan pemerintah bertujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dalam mengelola kelapa sawit. Pembinaan yang dilakukan sangat akan membantu para petani yang ada, mengingat kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani dalam hal pengelolaan kelapa sawit. Pembinaan ini juga akan memberikan dampak yang baik dalam peningkatan perekonomian masyarakat dimana petani yang ada di kabupaten mamuju tengah adalah mayoritas petani kelapa sawit.

Penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu masyarakat yang tinggal di Desa Babana terkait pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Surya Raya Lestari II kepada petani kelapa sawit, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai petani disini sangat bersyukur atas pembinaan yang di berikan kepada saya karna saya sudah bisa mengetahui bagaimana cara dalam berkebun kelapa sawit dengan benar.(Wawancara, RD 4 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Surya Raya Lestari sangat memberikan dampak yang positif bagi petani yang ada di kabupaten mamuju tengah ini. Dimana petani yang ada sudah mengetahui atau mempunyai pengetahuan dalam hal mengelola kelapa sawit yang baik dan benar.

Lanjut wawancara bersama masyarakat yang tinggal di desa tobadak mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Surya Raya Lestari, beliau mengatakan bahwa:

“Iya kami sangat terbantu dengan pembinaan yang di lakukan karena semenjak adanya pembinaan ini kami tidak pernahmi kebingungan karna nakasi tauki cara-cara yang benar dalam merawat kelapa sawit (Wawancara, AR 9 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, semenjak adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan PT Lestari II sangat memeberikan manfaat bagi petani yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan terbukti kerjasama yang dilakukan oleh

pemerintah dan PT Lestari II terbilang sukses di karenakan petani yang ada sudah merasakan hasil dan manfaat dari pembinaan yang dilakukan.

2. Sarana dan prasarana

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan PT Surya Raya Lestari II sangat memberikan dampak dalam pengembangan sarana dan prasarana terutama dalam bidang pertanian. Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi. Berikut hasil wawancara bersama kabid perkebunan mamuju tengah terkait kerja sama yang dilakukan dalam bidang pengembangan sarana dan prasaran. Beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi sarana dan prasaran kami dari pihak pemerintah hanya menyediakan tanah atau lahan perkebunan kepada petani khususnya untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. selebihnya itu diambil alih oleh PT Surya Raya Lestari II mulai dari pemberian bibit kelapa sawit kepada petani dan pembuatan atau perbaikan jalan menuju areal perkebunan. (Wawancara, AR 20 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam memberdayakan petani khususnya petani kelapa sawit tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mensejahterakan petani. terbukti pemerintah kabupaten mamuju tengah serius dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat khususnya petani kelapa sawit. dimana pemerintah menyediakan lahan perkebunan kepada petani untuk membantu para petani yang tidak mempunyai lahan sendiri.

Lanjut wawancara bersama kepala Personalia Kepegawaian PT Surya Raya Lestari II mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya

terkait kersama yang dilakukan dalam hal pengembangan sarana dan prasarana, beliau mengatakan bahwa:

“Dari PT Surya Raya Lestari II sendiri kami memberikan bantuan bibit kepada petani, bantuan bibit yang kami berikan ini di bayar secara di angsur selama 15 tahun dihitung mulai dari awal panen. Cara angsumnya ini yaitu petani harus menjual hasil panen kepada kami atau ke PT Surya Raya Lestari II selama 15 tahun. Jika sudah lebih dari 15 tahun petani tersebut bisa menjual hasil panen ketempat lain. Kami juga membangun jalan menuju areal perkebunan dan memperbaiki jalan pelesok menuju rumah warga dan yang paling penting juga kami menyediakan tempat tinggal atau perumahan kepada petani yang terkhusus kerja di PT Surya Raya Lestari II (Wawancara, HM 27 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemberian bantuan bibit kepada petani yang dilakukan oleh PT Surya Raya Lestari II memberikan keringanan bagi petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan adanya bantuan akan meringankan beban para petani tersebut, dimana bantuan bibit dapat di ansur oleh petani selama 15 tahun. Sejak berdirinya PT Surya Raya Lestari II memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan petani, mulai dari perbaikan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. Surya Raya Lestari II, menyediakan rumah bagi petani kelapa sawit terkhusus yang kerja di PT. Surya Raya Lestari II.

Lanjut wawancara bersama masyarakat yang tinggal di desa salugatta terkait kerja sama yang di lakukan Pemerintah dengan PT.Surya Raya Lestari II dalam hal pengembangan sarana dan prasarana, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sangat berterima kasih pada Pemerintah dan PT Surya Raya Lestari II karena telah memberikan bantuan lahan dan bibit kepada kami. Jujur sejak saya berkebun kelapa sawit hidup saya tidak pernah mengalami kesusahan , puyamaka motor sendiri yang jelasnya tidak terlalu

susahmi hidupku dan keluargaku (Wawancara, UR 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan PT Surya Raya Lestari II memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat petani kelapa sawit. semenjak masyarakat beralih untuk berkebun kelapa sawit perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan bisa dikatakan bahwa petani kelapa sawit yang ada di kabupaten Mamuju Tengah tergolong telah sejahterah.

Lanjut wawancara bersama masyarakat yang tinggal di Desa Polohu terkait kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan PT Surya Raya Lestari II dalam hal sarana dan prasarana, beliau mengatakan bahwa:

“Dulu jalan menuju rumah saya ini jelek sekali apa lagi kalau turunmi hujan tambah parah lagi. Tapi sekarang iya Alhamdulillah sudah baikmi. Dulu disini juga air tidak baikki tapi sekarang baikmi juga. Pokoknya sejak adai PT. Surya Rya Lestari II. disini banyak perubahan itumi yang tadi kubilang. Apalagi nakasiki bibit kelapa sawit dan baiknya lagi karna bisaki di angsur (Wawancar, RJ 19 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, semenjak berdirinya PT. Surya Raya Lestari II banyak membawa perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat khususnya petani kelapa sawit. Dimana PT. Surya Raya Lestari II ini banyak melakukan perbaikan infrastruktur dalam lingkungan masyarakat mulai dari perbaikan jalan menuju rumah warga, perbaikan saluran air dan yang paling penting memberikan bantuan bibit kelapa sawit kepada masyarakat yang ingin berkebun kelapa sawit.

3. Pemantauan

Pemantauan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan PT Surya Raya Lestari II dalam melakukan pemantauan langsung kelapangan kepada petani kelapa sawit. berikut wawancara bersama kabid perkebunan kabupaten mamuju tengah terkait kerja sama yang dilakukan dalam hal pemantauan, beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi pemantauan iya, kami dari Pemerintah tidak melakukan pemantauan kepada petani kelapa sawit. karna kami dari pihak Pemerintah sudah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada PT Surya Raya Lestari II untuk melakukan pemantaun kepada petani kelapa sawit (Wawancara, AR 20 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat meyimpulkan bahwa, dari segi pemanntau yang ada pihak pemerintah tidak terlibat dalam melakukan pemantauan kepada petani kelapa sawit.pihak pemerintah memberikan kewenangan kepada PT. Surya Raya Lestari II dalam melakukan pemantauan kepada petani kelapa sawit. hal ini dilakukan karna PT. Surya Raya Lestari II lebih memiliki karyawan yang cukup mempunih.

Lanjut wawancara bersama kepala personalia kepegawaian PT Surya Raya Lestari II terkait kerja sama yang dilakukan dalam hal pemantauan, beliau mengatakan bahwa:

“Kami dariPT Surya Raya Lestari II hampir setiap hari melakukan pemantauan kepada petani kelapa sawit, kami mempunyai tim khusus disini yang tugasya memang dalam melakukan pemantauan. Pemantauan yang kami lakukan ini agar kami bisa tau secara langsung mengenai kendala-kendala apa yang di hadapi oleh petani kelapa sawit, apa saja yang dibutuhkan, dan kurannya apa (Wawancara, HM 27 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemantau langsung sangat penting dilakukan dan dilaksanakan agar bisa mengetahui keadaan dan kondisi yang dilakukan oleh para petani khususnya petani kelapa sawit. dan hal ini sudah dilakukan oleh PT Surya Raya Lestari II dengan melakukan pemantauan langsung kepada petani kelapa sawit. dengan adanya pemantau yang dilakukan akan memudahkan dalam mengetahui permasalahan yang ada pada petani dan yang paling penting dengan adanya pemantauan yang dilakukan akan memudahkan dalam melakukan kontroling kepada petani kelapa sawit.

Lanjutan wawancara bersama masyarakat yang tinggal di desa Sinabatta terkait kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Surya Raya Lestari II dalam hal pemantauan, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sangat terbantu karena kalau ada masalah yang kami hadapi disini tidak jauh-jauh maki ke kantornya melapor karena datang setiap hari naliat-liatki disini kerja jadi gampang maki melapor (Wawancara, KH 23 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh PT Surya Raya Lestari II memberikan kemudahan kepada para petani kelapa sawit dalam hal tata cara dalam perawatan kelapa sawit dan para petani juga memberikan kemudahan kepada para petani untuk berkonsultasi secara langsung kepada PT Surya Raya Lestari II apabila ada permasalahan yang dihadapi.

Lanjut wawancara bersama masyarakat yang tinggal desa Salugatta terkait kerjasam yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Surya Raya Lestari II dalam hal pemantauan, beliau mengatakan bahwa:

“Iya bagus sekali apa selaluki kesini nabantu, naajari berkebun kelapa sawit jadi enakmi dirasa tidak terlalu susah maki kalau ada salah-salahta yang langsungki nakasi tau (Wawancara, UR Desember 2017).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, petani kelapa sawit yang ada di salugatta sangat memberikan dampak positif bagi para petani yang ada .dimana pemantaun yang dilakuakn oleh PT Surya Raya Lestari II kepada petani kelapa sawit membuat para petani tidak kewalahan dalam melakukan atau dalam berkebun kelapa sawit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan PT. Surya Raya lestari II dalam memberdayakan petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa variable (1) kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan PT. Surya Raya Lestari II dengan melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit cukup efektif dimana petani kelapa sawit yang ada memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang pengelolaan kelapa sawit yang benar. (2) memberikan bantuan kepada petani kelapa sawit berupa lahan perkebunan dan bibit kelapa sawit yang diangsur selama 10 tahun serta perbaikan sarana dan prasarana. Bantuan yang diberikan memberikan dampak yang begitu besar dalam perekonomian petani kelapa sawit (3) melakukan pemantaun kepada petani kelapa sawit yang rutin dilakukan setiap harinya. Pemantauan yang dilakukan cukup efektif dalam mengawasi dan mengontrol petani kelapa sawit.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih berperan penting dalam melakukan pemberdayaan petani khususnya petani kelapa sawit dimana Pemerintah daerahlah yang mempunyai kewajiban dalam hal tersebut.

2. Pemerintah dan PT. Surya Raya Lestari II lebih meningkatkan lagi kinerja kerjasama dalam memberdayakan para petani kelapa sawit.
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan para petani khususnya petani kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Almasdi Syahza. 2007. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis kelapa Sawit Di Daerah Riau*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadran. Bandung.
- American Heritage, Dictionary Of the Language. 2000. 4. Edition. Viewed On 17 January 2005 at www.bartleby.com/16/.
- Fadjar. 2006. *Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap*. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Gumbira-Sa'id, E. dan L. Febriyanti. 2005. *Prospek dan Tantangan Agribisnis Indonesia*.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasyim, Harris. 2005. *Pengembangan Kemitraan Agribisnis: Konsep, Teori & Realita Dalam Ekonomi Biaya Transaksi*. Bandar Lampung: Lembaga Penerbitan Universitas Lampung.
- Hitmat, H. (2004). *Participatory Research Appraisal*. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Irawan, Ferry. 2004. *Implementasi Public- Private Partnership di PT. Kereta Api Indonesia – Bandung*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
- Madura, Jeff. 2001. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mifta, Toha, 2003. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mulyasa. 2008. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung : Rosdakarya.
- Rahutami, Angelina Ika. 2001. *Public-Private Partnership: Suatu Solusi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Berbasis Kompetensi*. Semarang: Jurnal ekonomi.
- Saragih, B. (2001). *Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis*. Bogor: Yayasan USESE bekerjasama dengan Sucofindo.
- Suharto, Edi 2006, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama (Forthcoming InsyaAllah).
- Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfa Beta.
- Sumodiningrat. *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta : IDEA, 2004).
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Syahza, Almasdi. 2007. *Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit*, dalam

Jurnal Ekonomi, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Thoby Mutis. (2004). *Kewirausahaan Yang Berproses*. Jakarta : Grasindo

Thoha.M. (2003). *Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Tri. 2004. *Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah*. Pusat kajian dan Diklat Aparatur I LAN.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kemitraan

UU No 18 Tahun 2004, Tentang perkebunan di Indonesia, Jakarta.

RIWAYAT HIDUP



ASRAD. Dilahirkan pada tanggal 24 April 1995 di Desa Tobadak Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Anak kedua dari lima bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Gariming dan Sumanti. Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2002-2007 di Sekolah Dasar Inpres Pandoa-doang Kabupaten Mamuju.

Setelah tamat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Tobadak IV Kabupaten Mamuju dan tamat pada tahun 2010. Kemudian setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Husnayain Salulebo Kabupaten Mamuju dan tamat pada tahun 2013.

Setelah tamat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan.